

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :

Hilman Rosyaidi  
0611010042/FE/IESP

Kepada

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2011

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan



Hilman Rosyaidi  
0611010042/FE/IESP

Kepada

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2011

## USULAN PENELITIAN

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

Yang diajukan

Hilman Rosyaidi  
0611010042/FE/IESP

telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi

Pembimbing Utama

Drs. Ec. Arif Bachtiar, Msi  
NIP : 1916101041993031001

Tanggal : .....

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dra.EC.Wiwin Priana Primandhanna, MT  
NIP:196008101990031001

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

SKRIPSI

Yang diajukan

Hilman Rosyaidi  
0611010042/FE/IESP

Disetujui untuk Ujian Lisan oleh

Pembimbing Utama

Drs. Ec. Arif Bachtiar, Msi  
NIP : 1916101041993031001

Tanggal : .....

Mengetahui  
Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

Drs. Rahman Amrullah Suwaidi, MS  
NIP : 196003301986031003

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun oleh :

Hilman Rosyaidi  
0611010042/FE/IESP

Telah dipertahankan dihadapan  
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 17 Juni 2006

Pembimbing Utama

Tim Penguji  
Ketua

Drs. Ec. H. Ilham, MM

Drs. Ec. H. Usman Ali, MKes

Sekretaris

Drs. Ec. Arief Bachtiar, Msi

Anggota

Drs.Ec. H. Ilham, MM

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

DR. Dhani Ichsanuddin Nur, MM  
NIP. 030 202 389

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
VOLUME EKSPOR PLYWOOD  
DI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Disusun oleh :

Ratna Puspita Dewi  
0211010219/FE/IESP

Telah dipertahankan dihadapan  
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 17 Juni 2006

Pembimbing Utama

Tim Penguji  
Ketua

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT

Drs. Ec. Soerjadi, MS

Sekretaris

Drs. Ec. Samsul Huda, MT

Anggota

Drs. Ec. Wiwin Priana, MT

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

DR. Dhani Ichsanuddin Nur, MM  
NIP. 030 202 389

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan Rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN MASYARAKAT PADA BANK UMUM DI JAWA TIMUR”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ir. Hamidah Hendra Rini, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi, serta saran hingga terwujudnya skripsi ini. Untuk itu pula dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Drs. EC. Marseto, Msi selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Drs. EC. Wiwin Priana Primandhana, MT selaku Dosen wali yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan didalam perkuliahan.

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

### DAFTAR GAMBAR

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Ekspor.....	11
2.2.1.1. ....	12
2.2.1.2. ....	13
2.2.1.3. Manfaat or .....	14
2.2.1.4. Faktor yang Meningkatkan .....	15
2.2.2. r .....	16
2.2.3. ....	17
2.2.4. ....	20
2.2.5. Hubungan Ekspor – Impor .....	23
2.2.6. Chenery – Stront Two qap Model.....	25
2.2.7. Pertumbuhan Ekonomi .....	26
2.2.7.1. Pengertian dan Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi	26
2.2.7.2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi .....	27
2.2.8. Produk Domestik Bruto (PDB).....	33
2.2.9. Pengertian Perdagangan Internasional .....	35
2.2.9.1. Tujuan Perdagangan Internasional .....	37
2.2.9.2. Manfaat Perdagangan Internasional .....	27
2.2.9.3. ....	38
2.2.10. Teori Permintaan Penawaran .....	42



2.2.11. Kurva IS – LM .....	44
2.2.12. Kurs .....	46
2.2.13. Valuta Asing .....	47
2.2.13.1. Macam-macam Kurs Valuta Asing .....	48
2.2.14. Devisa .....	50
2.2.15. Investasi .....	50
2.2.16. Barang dan Jasa .....	51
2.3. Kerangka Pikir .....	52
2.4. Hipotesis .....	55

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	56
3.1.1. Ekspor Non Migas .....	56
3.1.2. Impor Non Migas .....	56
3.2. Teknik Penentuan Sampel .....	57
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .....	57

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Fungsi Ekspor.....	22
Gambar 2	Fungsi Impor .....	23
Gambar 3	Kurva Permintaan dan Penawaran.....	42
Gambar 4	Kurva IS – LM .....	45
Gambar 5	Kerangka Pikir.....	54

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

Oleh :

Hilman Rosyaidi

## ABSTRAKSI

Sebagian negara berkembang Indonesia dalam pengembangannya nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar. Dalam mengatasi pemerintah memasukkan modal dari luar negeri disebut pinjaman luar negeri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat investasi ( $X_1$ ) Tabungan ( $X_2$ ), Pengeluaran Pemerintah ( $X_3$ ), Penerimaan Pemerintah ( $X_4$ ), Ekspor ( $X_5$ ), dan Impor ( $X_6$ ) data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang diambil selama kurun waktu 20 tahun periode waktu triwulan sejak awal tahun 1990 sampai dengan awal 2010. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur cabang Surabaya dan Bank Indonesia. Untuk analisis data menggunakan alat bantu Statistic Program For Social Science (SPSS). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t dan uji-F statistik.

Berdasarkan hasil analisis pengujian secara Simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat Investasi ( $X_1$ ), Tabungan ( $X_2$ ), Pengeluaran Pemerintah ( $X_3$ ), Penerimaan Pemerintah ( $X_4$ ), Ekspor ( $X_5$ ), dan Impor ( $X_6$ ) terhadap Tabungan Masyarakat pada Bank Umum ( $Y$ ). Hal ini diketahui dari uji F yaitu diperoleh nilai  $F_{hitung} = 147,804 > F_{tabel} = 3,59$ . Sedangkan secara Parsial variabel tingkat inflasi ( $X_1$ ), tidak berpengaruh secara nyata terhadap Tabungan Masyarakat ( $Y$ ) dengan menggunakan uji t dimana  $t_{hitung} = 1,266 < t_{tabel} = 2,201$ . Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ ), tidak berpengaruh secara nyata terhadap Tabungan Masyarakat ( $Y$ ) dengan menggunakan uji t dimana  $t_{hitung} = 1,921 < t_{tabel} = 2,201$ , sedangkan variabel Jumlah Uang Beredar ( $X_3$ ) berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap Tabungan Masyarakat ( $Y$ ) dimana  $t_{hitung} = 7,284 > t_{tabel} = 2,201$ .

Kata kunci : Tingkat Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Uang Beredar, dan tabungan Masyarakat pada Bank Umum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia banyak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunannya. Salah satunya adalah terbatasnya sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam mengatasi keterbatasan dana tersebut, pemerintah Indonesia memasukkan modal dari luar negeri yang disebut pinjaman luar negeri.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatur pinjaman luar negeri melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (TAP MPR-RI) No : IV / MPR / 1998 yang berbunyi sebagai berikut : “Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar dan pelaksanaannya berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersambung pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa. Pengerahan dari dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri

yang merupakan pelengkap semakin berkurang. Sehingga pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan“ (Anonim, 1994 : 358).

Dewasa ini wacana mengenai hutang luar negeri bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu seperti dulu. Apalagi posisi hutang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan nomer empat terbesar di dunia setelah Meksiko, India, dan Brazil. Meski hampir setiap orang menyadari bahwa konsekuensi dari hutang adalah mengembalikannya, namun tidak banyak yang bisa berbuat atas ketergantungan mereka terhadap pemberi hutang. Semakin besar penerimaan hutang, semakin besar pula resiko adanya investasi masalah di luar persoalan transaksi hutang-piutang itu sendiri. Ini berarti bahwa mau tidak mau negara peminjam harus menerima kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara pemberi pinjaman (negara pendonor). Dan tentunya mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu negara, bila negara-negara tersebut menginginkan kebijakan yang sudah ditentukan oleh negara pendonor. Misalnya, terjadi resesi ekonomi yang berkepanjangan pada suatu negara, menurunnya nilai ekspor, dan nilai tukar mata uang yang terus merosot. (Prasetyanti, 1999 : 166).

Dimulai dari krisis mata uang Bath di Thailand, lebih melebar ke Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Philipina, dan akhirnya merambah di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Malapetaka yang pada mulanya hanya krisis moneter ini kemudian berubah menjadi krisis keuangan dan ekonomi yang berkepanjangan menjadi krisis politik dan

sosial yang diwarnai dengan kekerasan. Rezim militer Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun tumbang, gelombang revormasi dan hukum mulai dijalankan. Tetapi dalam hal ini landasan perekonomian sudah terlanjur babak belur karena memang tidak mempunyai infrastruktur-infrastruktur perekonomian yang kuat. Prakarsa Bank Dunia, IMF, dan lembaga-lembaga internasional lainnya memberikan dana bantuan dan pinjaman baru dalam jumlah besar. Kemudian justru semakin membuka “borok-borok” sistem perekonomian Indonesia yang selama ini “tidak masalah dengan hutang luar negeri” serta merta berubah. Mulai muncul analisis-analisis terbuka dan berani memperlihatkan data secara gamblang, tentang berbagai penyakit mengenai hutang luar negeri separah yang pernah dialami oleh semua negara penghutang berat dan bermasalah di dunia. (Topatimasang, 1999 : 6)

Hingga Juli 1999 hutang luar negeri Indonesia telah mencapai angka US \$ 150 Milliar, suatu jumlah yang mencatat rekor hutang terbesar diantara semua negara penghutang berat di dunia ketiga yang melampaui rekor fantastik pada dasawarsa hutang tahun 1980-an. Jika tolak ukur Bank Dunia digunakan, jumlah hutang luar negeri lebih besar dari pendapatan, dimana hutang per kapita rata-rata US \$ 377. Sedangkan pendapatan perkapita per tahun nilai aktualnya hanya US \$425, maka sebenarnya Indonesia sudah layak masuk dalam kategori kelompok “Negara Miskin Penghutang Berat”. Bahkan proyeksi Bank Dunia memperlihatkan jumlah hutang luar negeri Indonesia tetap besar dan tidak

lebih kecil dibandingkan dengan 10 tahun lalu, yakni US \$ 49,3 Milliar pada tahun 2000 nanti, itupun masih dengan asumsi jika keadaan perekonomian dapat dipulihkan. (Topatimasang, 1999 : 6).

Menurut (Jamli, 1996 : 209) sistem ini dalam jangka pendek dapat menunjang stabilitas nilai tukar. Namun demikian, karena tingginya laju inflasi di Indonesia dengan negara-negara mitra dagang. Sistem tersebut telah menyebabkan nilai tukar Rupiah mengalami overload, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap daya saing komoditi Indonesia di pasar internasional yang nantinya dapat menjurus pada defisit neraca pembayaran Indonesia. Ini berarti menurunnya cadangan nasional baik di Bank Sentral maupun di Bank Devisa. Jika defisit dibiarkan berlarut-larut, maka akan mengakibatkan semakin berkurangnya cadangan nasional serta mempersulit negara dalam hubungan keuangan dengan perekonomian dunia.

Hutang luar negeri merupakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang terinspirasi dari Marshall Plan dan dilandasi oleh perspektif teoritis tentang perlunya aliran modal dari kawasan terbelakang. Transfer dana dalam program Marshall Plan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian negara-negara Eropa yang hancur akibat dari Perang Dunia II. Program tersebut dinilai berhasil dan kemudian ditransplantasikan ke negara-negara miskin di bagian selatan dunia., yang kemudian menimbulkan fenomena baru dalam perekonomian dunia, yaitu krisis hutang luar negeri.

Krisis hutang luar negeri di negara berkembang pada tahun 1980-an sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik dunia (Rudolf H. Straham, 1999 : 89).

Sejarah telah menunjukkan, tujuh tahun setelah meledaknya krisis hutang di seluruh dunia, tatanan di banyak negara berkembang semakin nampak merosot. Dalam kerusuhan yang diikuti dengan diumumkannya program penghematan nasional yang didukung oleh Dana Moneter Indonesia (IMF). Maka setelah Meksiko, Brazil, dan negara penghutang lainnya pertama kali mengumumkan ketidakmampuannya membayar kembali semua hutang-hutang yang semakin besar.

Keseluruhan jumlah hutang negara dunia bagian ketiga sudah melonjak dari US \$ 831 Milliar menjadi sekitar US \$ 1.300 Milliar (John Cavaragh dan Robin Broad, 99 : 235).

Di Indonesia pokok persoalannya yang menyangkut hutang luar negeri kini menduduki persoalan utama dalam perekonomian Indonesia (Sritua Arif, 1999 : 73). Beban hutang yang menumpuk dalam waktu yang relatif singkat selama tiga tahun setelah krisis, ditambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Indonesia sebenarnya sudah masuk ke dalam perangkap hutang luar negeri. Hutang luar negeri kita setiap tahunnya meningkat terus, baik jumlah stock maupun cicilannya. Bahkan (Faisal Basri, 2002 : 259) menyebutkan bahwa Indonesia telah terjebak dalam perangkap hutang (debt trap) dimana pembayaran cicilan dan bunga hutang ditutup kembali dengan



hutang baru. Semenjak tahun 1987 total cicilan (pokok dan bunga) hutang luar negeri kita sudah jauh lebih besar dari pinjaman baru yang dapat kita terima. Artinya, kita meminta untuk membayar kembali kewajiban-kewajiban atas hutang yang telah ada sebelumnya. Ini jelas merupakan beban yang semakin berat bagi perekonomian nasional, khususnya pada APBN dan neraca pembayaran.

Pembayaran cicilan beserta bunga dari akumulasi hutang luar negeri pemerintah yang dibayar melalui APBN telah menyebabkan anggaran negara menjadi sarat dengan beban pembayaran hutang. Sementara pengeluaran untuk pembangunan menjadi relatif terabaikan. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa yang akan datang. Rakyat harus merelakan sebagian besar pajak yang dibayarnya untuk negara kreditur. Padahal rakyat berhak untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dari pajak yang telah dibayarnya.

Pada dasarnya dana yang berasal dari hutang luar negeri dimaksudkan untuk membantu akibat keterbatasan akumulasi modal dalam negeri, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Di Indonesia hutang luar negeri digunakan untuk mengatasi defisit pada anggaran pemerintah (APBN) dan untuk pengendalian defisit pada neraca pembayaran yang biasa dikenal dengan model tiga kesenjangan (Three Gaps Model) (T. Alun, 1992:213).

Suatu masalah yang saat ini menggelisahkan negara berkembang adalah masalah pembayaran kembali hutang-hutang yang telah diperoleh

di masa lalu karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara penghutang. Ada kalanya persyaratan tersebut tidak mampu dipenuhi, dan negara yang menghadapi masalah semacam itu tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar kembali hutang mereka. Kesulitan yang paling banyak dihadapi negara berkembang adalah menciptakan tabungan dalam mata uang asing untuk mencicil pembayaran kembali pinjaman.

Sebagai akibat dari pencairan hutang luar negeri yang jumlahnya pada umumnya selalu lebih besar dari pembayaran cicilan atau angsuran pokok pinjaman, maka total hutang luar negeri Indonesia cenderung meningkat terus.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah hutang luar negeri pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 1992 sebesar 48.768 Juta US \$ hingga tahun 1995 sebesar 59.589 Juta US \$. Meskipun pada tahun 1997 mengalami penurunan jumlah hutang menjadi sebesar 53.865 Juta US \$ tetapi pada tahun 1998 kembali mengalami peningkatan sebesar 67.316 Juta US \$ hingga tahun 2000 sebesar 74.690 Juta US \$. Penurunan jumlah hutang pemerintah Indonesia kembali mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 69.403 Juta US \$ namun kembali lagi mengalami peningkatan pada tahun 2002 sebesar 74.071 Juta US \$ hingga tahun 2010 sebesar 82.269 Juta US \$.

Buruknya pengelolaan hutang dapat dilihat dari empat faktor sebagai berikut, (i) Hutang dalam bentuk valuta asing dipakai untuk proyek yang penerimaannya dalam bentuk Rupiah, (ii) Hutang

jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang, (iii) Resiko fluktuasi nilai tukar tidak diamankan, dan (iv) Dana yang diperoleh Bank lebih banyak disalurkan untuk kelompok usahanya sendiri, sehingga penyaluran kredit yang dananya berasal dari luar negeri tidak lagi mengindahkan azas kehati-hatian dan kelayakan usaha.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yang berisikan pokok pikiran, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor ekonomi apakah yang mempengaruhi hutang luar negeri Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap hutang luar negeri Indonesia.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti maka tujuan yang dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hutang luar negeri.
2. Untuk mengetahui faktor manakah yang mempunyai pengaruh besar terhadap hutang luar negeri.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi peneliti yang berhubungan dengan hutang luar negeri.

2. Bagi Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi maupun akademisi yang ingin mengetahui tentang hutang luar negeri di Indonesia.

b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bagian dari media informasi yang berkaitan dengan hutang luar negeri dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tertentu mengenai permasalahan yang disebabkan oleh hutang luar negeri.